

TRANSPARANSI KEUANGAN PADA PENGELOLAAN RITUAL DI PURA ULUN DANU BATUR

Oleh:

Cokorda Gde Bayu Putra | Ni Komang Sumadi

Universitas Hindu Indonesia

cokdebayu88@gmail.com, sumadisamuh@unhi.ac.id

Proses Review 10-25 September, Dinyatakan Lolos 28 September

Abstract

This article tries to explain the practice of transparency on ritual ceremony at Ulun Danu Batur Temple. Through a descriptive approach, this article describes the disclosure and provision of financial information carried out by Pengempon during the Ngusaba Kadhasa as part of the implementation of good governance. The Transparency of the financial activities carried is at least a unique characteristic for the management of the temple. This article also shows the efforts of to display the disclosure of financial information as part of a sincere form of offering to Ida Bhatara.

Keywords: Pengempon, Temple, Transparency, Ritual

Abstrak

Artikel ini mencoba menggambarkan praktik transparansi pada pengelolaan ritual upacara di Pura Ulun Danu Batur. Melalui pendekatan deskriptif, artikel ini menjelaskan adanya pengungkapan dan penyediaan informasi keuangan yang dijalankan oleh Pengempon Pura pada saat Upacara Ngusaba Kadhasa sebagai bagian dari penerapan tata kelola organisasi yang baik. Transparansi aktivitas keuangan yang dijalankan tersebut setidaknya menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi wajah pengelolaan Pura sebagai tempat ibadah. Artikel ini juga menunjukkan upaya pengempon untuk menampilkan keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari bentuk persembahan yang tulus kepada Ida Bhatara.

Kata kunci: Pengempon, Pura, Transparansi, Ritual.

I. PENDAHULUAN

“Batur” merupakan sebuah kata yang sering diidentikkan dengan keberadaan gunung, danau, dan sebuah Pura. Sesungguhnya jika dicermati bersama, keberlangsungan hayati dan

denyut pertanian hampir di seluruh kawasan Bali sangat bergantung dari ekosistem pegunungan utara Batur tersebut. Tak mengherankan, para pengamat dan analis lingkungan menyebut Batur sebagai jantung perdaban dan pusat konservasi Bali. Limpahan

air yang mengalir ke berbagai sungai dan areal persawahan di hilir memang ditopang dari Gunung dan Danau Batur. Itu kemudian yang membangun relasi kuat antara subak-subak di Bali dengan Pura Ulun Danu Batur, Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani yang diyakini sebagai stana *Hyang Bhatari Dewi Danuh*. Ariana (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan rujukan beberapa teks, sosok yang dimuliakan di Pura Ulun Danu Batur tersebut juga merupakan representasi penguasa Gunung Batur yang memang berkuasa atas kesejahteraan. Keyakinan itulah yang membangun jejaring antara masyarakat Batur dengan masyarakat Bali di daratan terlebih saat gelaran Upacara *Ngusaba Kadasa*.

Ngusaba Kadasa yang merupakan upacara selamatan desa atau subak sejatinya juga merupakan cerminan ajang pemersatu umat. Berbagai elemen lintas golongan baik itu pemerintah, subak, *krama* desa dan umat *sedharma* berduyun-duyun datang menghaturkan bakti serta berkumpul bersama pada gelaran acara yang umumnya dilaksanakan selama 11 hari tersebut. Jauh daripada itu, upacara tahunan yang sering disebut juga dengan upacara *Bhatara Tedun Kabeh* tersebut menyajikan beberapa keunikan yang mungkin jarang ditemukan di beberapa daerah dan Pura-Pura lainnya. Salah satunya adalah penyampian pertanggungjawaban keuangan sekaligus ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi selama upacara *ngusaba*. Tradisi yang dilaksanakan secara terbuka tepat di hari kesebelas pada saat *meprani* tersebut menunjukkan adanya penerapan praktik akuntabilitas tata kelola keuangan yang memastikan bahwa segala fungsi dalam organisasi berjalan efektif dan laporan pertanggungjawaban keuangan tersampaikan kepada para pihak yang berkepentingan (Putra, 2021).

II. PEMBAHASAN

2.1 Catatan tentang “Ulu” serta kesadaran sebagai Juru Sapu dan Juru Sapa

Pura sebagai sebuah organisasi religi yang bersentuhan dengan denyut dan nafas

masyarakat komunal tentu dihadapkan dengan tuntutan transparansi serta akuntabilitas. Sebagai salah satu azas penerapan prinsip tata kelola yang baik, **transparansi** dan **akuntabilitas** dipandang tidak saja mampu meningkatkan kinerja organisasi namun menumbuhkembangkan keyakinan umat (Putra, 2020). Sebagai sebuah *Kahyangan Jagat* yang disematkan label “Ulu” dalam satu kesatuan kosmologis *Padma Bhuwana* sesuai penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, tampaknya nilai-nilai keterbukaan dalam setiap aktivitas proses dan aktivitas keuangan menjadi sebuah tuntutan untuk senantiasa dilakukan. Beruntung Pura Ulun Danu Batur diwarisi segudang tradisi yang masih eksis hingga kini termasuk beragam ritual dan praktik penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diyakini juga sebagai amanat teks *Raja Purana*.

Selain kepercayaan pada teks dan warisan tradisi tersebut, sejatinya ada pandangan ideologis yang membekas dalam sanubari masyarakat Batur khususnya *pangempon* Pura. Pandangan fundamental masyarakat Batur tersebut ialah kesadaran akan fungsinya sebagai *Juru Sapu* dan *Juru Sapa*. *Pangempon* Pura bersama-sama dengan masyarakat adat di Batur dengan tulus merawat kesucian Pura, Gunung dan Danau Batur dengan beragam ritus yang pada tujuan akhirnya adalah senantiasa memohon berkah *Hyang Bhatari Dewi Danu* demi kesuburan seluruh areal pertanian di Bali. Pada titik ini, Kita dapat melihat bagaimana posisi *pangempon* dan masyarakat Batur bertindak sebagai *Juru Sapu* yang berarti bertugas menjaga dan merawat stana *Ida Bhatari* sebagai hulu dan sumber dari segala sumber¹. Termasuk didalamnya adalah senantiasa menampilkan keterbukaan informasi pertanggungjawaban keuangan *Ngusaba Kadasa*. Menyimak keunikan tersebut semacam ada korelasi antara tindakan yang

1 Perihal konsepsi Juru Sapa dan Juru Sapu yang diyakini *pangempon* Pura dan masyarakat Batur sempat Penulis tulis pada makalah catatan lepas acara Sarasastra “Bincang Buku Ekologisme Batur” karya IK Eriadi Ariana / Jero Penyarikan Duuran Batur yang diselenggarakan Yayasan Janahita Mandala Ubud pada tanggal 5 Juni 2021.

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan harapan akan hadirnya berkah yang berlimpah dari *Hyang Bhatari Dewi Danuh*. Kesadaran tersebut sejalan dengan penelitian Putra (2020) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan yang disajikan oleh pengurus desa adat dimaknai sebagai bentuk persembahan yang dihaturkan dihadapan *Ida Hyang Widhi Wasa* dan seisi alam yang telah memberikan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya merajut jalinan silaturahmi antara Pura Ulun Danu Batur dengan Krama Subak dan beberapa desa, *Pangempon* Pura senantiasa memberi pemberitahuan kepada Krama Subak perihal akan digelarnya sebuah hajatan *Upacara Kadasa*. Melalui aktivitas "nyuratang" lontar yang nantinya dikirim ke berbagai subak dan desa, *Pangempon* berupaya mengingatkan keterlibatan Krama Subak dan beberapa Desa yang dikenal dengan *Pasih*an tersebut perihal akan digelarnya *Ngusaba Kadasa*. Poin ini menyiratkan pesan etika yang mendalam tentang posisi *Pangempon* sebagai *Juru Sapa* masyarakat Bali utamanya Krama *Pasih*an. Maka tak mengherankan jika Kita menyaksikan perwakilan subak-subak dan desa-desa berdatangan dan terlibat aktif dalam persiapan upacara *ngusaba kadasa* selain menghaturkan *sawinih* atau *sarin tahun* berwujud barang dan nominal uang.

2.2 Keterbukaan Sumber Penerimaan dan Penggunaan Dana

Seperti layaknya Pura-Pura lainnya dalam menggelar Upacara, *ngusaba kadasa* di Pura Ulun Danu Batur juga melibatkan banyak sumber daya manusia. Selain keterlibatan masyarakat, jumlah dana dan kelengkapan upacara pun tidak sedikit untuk sekelas *Ngusaba*. Dari gambaran informasi yang Penulis peroleh selama melakukan amatan di Pura Ulun Danu Batur beberapa penerimaan yang masuk ke Pura bersumber dari uang tunai yang berasal dari urunan *krama*, subak dan desa-desa, *sesari* selama upacara berlangsung, sumbangan pemerintah serta dana punia dari para pelaku usaha. Selain itu terdapat pula beberapa sumbangan barang seperti hewan *wawalungan*, *rerampen*, *bija ratus*, *palagembal* dan

kelengkapan upacara lainnya. Dari sejumlah dana yang terhimpun, penggunaannya dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendukung pelaksanaan upacara yang meliputi: konsumsi, *upakara* dan *bebantenan*, transportasi, keperluan listrik, keperluan sesari *pamuput*, serta kelengkapan administrasi dan percetakan.

Hasil akhir laporan pertanggungjawaban sumber dan penggunaan dana yang berhasil dihimpun dan dilaporkan secara terbuka pada saat *meprani* sejatinya berasal dari rangkaian siklus aktivitas pencatatan dan pengorganisasian yang baik oleh *pangempon* Pura. Dengan padatnya animo masyarakat yang berkunjung serta dibarengi dengan intensitas dana punia yang masuk setiap harinya selama upacara berlangsung, maka pola pemilahan tugas dan pembagian peran dalam organisasi terlihat berjalan sangat efektif. Ini dibuktikan dari alur catatan harian penerimaan dana yang tercatat sama dengan saldo nominal yang dihitung serta berlanjut hingga beberapa jam sebelum penyampaian pertanggungjawaban keuangan disampaikan secara terbuka. *Pangempon* juga melibatkan beberapa regu dalam proses perhitungan fisik kas yang bersumber dari dana punia sehingga kandungan informasi jumlah dana tidak diketahui oleh hanya segelintir orang semata.

Mengutip prinsip dasar transparansi pada Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia yang menitikberatkan pada pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses, maka dapat dikatakan praktik tata kelola keuangan *Ngusaba Kadasa* di Pura Ulun Danu Batur mencerminkan bentuk penerapan transparansi yang unik. Ini terlihat dari beberapa hal seperti pengungkapan, akses informatif, penyediaan informasi. Dalam panggung terbuka yang dihadiri *krama*, perwakilan subak, para pemuka adat serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Se-Bali, *pangempon* memaparkan seluruh penerimaan dana dan barang yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cukup detail termasuk biaya-biaya operasional yang dikeluarkan selama menunjang pelaksanaan upacara *ngusaba*. Maka tak mengherankan durasi waktu yang diperlukan untuk

menyampaikan pertanggungjawaban keuangan cukup lama dikarenakan seluruh catatan atas laporan sumber dan penggunaannya disampaikan dihadapan para umat dan undangan yang hadir. Diluar pembacaan detail, *pengempon* juga menyerahkan rekapan fisik laporan pertanggungjawaban kepada para yang hadir. Dengan bertumpu pada keterbukaan akses dan penyediaan informasi, maka dualitas mekanisme pertanggungjawaban tersebut telah mencerminkan praktik transparansi yang unik dan berkarakter sesuai warisan tradisi di masa lalu.

III. PENUTUP

Keberlangsungan adat dan ritual sebagai wujud nyata praktik keagamaan di Bali merupakan tanggung jawab kita bersama utamanya bagi para pengelola aktivitas adat di Desa-Desa dan di Pura-Pura. Penerapan transparansi sebagai sebuah keterbukaan informasi wajib dilakukan oleh para pengelola Pura yang diberikan amanah oleh *Krama* dan Umat. Jika kita sedikit menoleh pada entitas *profit*, maka praktik keterbukaan segala bentuk informasi yang dilakukan oleh pengelola atau *manajemen* kepada para pemegang saham dan masyarakat luas (jika perusahaan terbuka) merupakan bagian dari usaha menumbuhkembangkan iklim tata kelola yang baik sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat yang dikemudian hari mampu meningkatkan nilai dari organisasi. Sejatinya

dalam pengelolaan organisasi Pura yang berbasis nonlaba, penerapan nilai dan praktik serupa juga merupakan sebuah keniscayaan terlebih bersentuhan erat dengan dimensi sosial serta tidak lepas dari persoalan vertikal.

Penerapan praktik transparansi keuangan di Pura Ulun Danu Batur saat upacara *ngusaba kadasa* setidaknya menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi wajah pengelolaan Pura sebagai tempat ibadah. Dengan kesadaran ideologis sebagai *pengayah*, *pangempon* telah mempraktikkan keterbukaan pengungkapan informasi keuangan upacara. Penyediaan dan akses informasi dalam bentuk keterbukaan proses dan pelaporan tersebut kian unik tatkala prosesi dijalankan dalam gelaran upacara *maprani* dan *Ida Bhatara Mekabehan* masih berstana di plataran utama Pura. Sehingga pada titik ini terlihat pula upaya menampilkan keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari persembahan kepada *Ida Bhatara*. Tampaknya keunikan itu sejalan pula dengan penelitian Putra (2021) yang mencoba melihat kesadaran terdalam pelaku akuntabilitas di Pura Ulun Danu Batur yang memang dilatarbelakangi oleh motivasi menampilkan pertanggungjawaban vertical dilandasi sikap *lascarya* yang berawal dari kesadaran pada konsep *madewa saksi*. Bahwasanya segala daya upaya yang dilakukan merupakan ibadah dan janji untuk mempersembahkan yang terbaik dihadapan *Ida Bhatari* demi terjaganya kesucian dan *taksu* Pura.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, I Ketut Eriadi. (2020). *Ekologisme Batur*. Singaraja: Mahima Institute.
- Putra, C. G. B. P., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561-580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>.
- Putra, C. G. B. P. (2021). Makna Praktik Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan (Studi Fenomenologi Ritual Upacara di Pura Ulun Danu Batur. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019).